**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

**ARTIKEL**

****

**Diajukan dalam Rangka Memenuhi Syarat Ujian Sidang Tesis Pada Program Studi Magister Administrasi dan Kebijakan Publik Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung**

Oleh:

**SUTOPO APRIWENDO PUTRA**

**NPM: 178010017**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI**

**KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2021**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjur dan untuk mengetahui keberhasilan Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kepegawaian dan faktor Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cianjur. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode analitis. Penelitian dilakukan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cianjur. berada di Jalan Raya Bandung KM 2 No. 63 Karangtengah, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, narasumber/informan dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjur, Kepala Bidang Pengembangan Karir, Kepala Subbagian Perencanaan dan Informasi Kepegawaian, dan Pengelola SIMPEG. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan observasi dan wawancara.

Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjur yang secara umum telah dilakukan dengan cukup baik. Namun dalam penerapan kebijakan Sistem Informasi Kepegawaian masih terdapat kendala yang salah satunya adalah mengenai Keberhasilan Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cianjur dan faktor yang dapat mendorong dan menghambat dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cianjur.

Kata kunci : Implementasi kebijakan publik:

1. Komunikasi;
2. Sumber daya;
3. Disposisi;
4. Struktur birokrasi.

***ABSTRACT***

The purpose of this research is to find out how the Implementation of Personnel Information System Policy at the Regional Education and Training Personnel Board of Cianjur Regency and to determine the success of the Implementation of the Personnel Information System Policy and the factors of Implementation of the Personnel Information System Policy at the Regional Education and Training Personnel Agency (BKPPD) Cianjur Regency. . This research was conducted in 2021.

This study uses a qualitative approach and this type of research uses descriptive qualitative research with analytical methods. The research was conducted at the Regional Education and Training Personnel Agency (BKPPD) of Cianjur Regency. located on Jalan Raya Bandung KM 2 No. 63 Karangtengah, Cianjur Regency, West Java Province. The data used in this study are primary data and secondary data, the resource persons/informants in this study were the Head of the Cianjur Regency Regional Personnel Education and Training Agency, the Head of Career Development, the Head of the Planning and Personnel Information Subdivision, and the SIMPEG Manager. Data collection techniques in this study were carried out using observation and interviews.

The implementation of the Civil Service Information System Policy in the Regional Education and Training Personnel Board of Cianjur Regency which in general has been carried out quite well. However, in the implementation of the Civil Service Information System policy, there are still obstacles, one of which is regarding the successful implementation of the Employment Information System Policy in the Regional Education and Training Personnel Agency (BKPPD) of Cianjur Regency and the factors that can encourage and hinder the implementation of the Implementation of the Civil Service Information System Policy at the Civil Service Agency. Regional Education and Training (BKPPD) Cianjur Regency.

Keywords: Public policy implementation:

1. Communication;
2. Resources;
3. Disposition;
4. Bureaucratic structure.

**Daftar Pustaka**

**Sumber Buku :M**

Agustino, Leo (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Agustino, L. (2014). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Azhar Susanto, (2013), Sistem Informasi Akuntansi,Struktur,Pengendalian,Resiko,Pengembangan, Edisi Perdana. Bandung : Lingga Jaya.

Cresswell, J. W. (2017). Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Ketiga). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dunn, William. (1998). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

……………….. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Edwards III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Gordon, B.Davis. (2002). Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen. Jakarta : PPM.

Indiahono, D. (2009). Kebijakan Publik (Berbasis Dynamic Policy Analisys). Yogyakarta: Gava Media.

Islamy, M. Irfan. 2009. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Jeffrey, Whitten L. (2006) . Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Leo, Agustino. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta

Miles dan Huberman. 2009. Metodologi Penelitian Sosial Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook (Edition 3). Jakarta: UI-Press.

Mulyanto, A. (2008). Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Neuman, W. L. (2017). Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Edisi 7). Jakarta: Pearson Education Inc dan Indeks.

Riant Nugroho (2017). Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Santosa, P. (2008). Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung: PT. Refika Aditama.

Simamora, H. (2004). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: STIE YKPN.

Subarsono. (2006). Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Gramedia.

Sutanta, Edhy. (2003). Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Winarno, Budi. (2007). Kebijakan Publik :Teori dan Proses. Yogyakarta :Med Press ( Anggota IKAPI).

Winarno, Budi(2016). Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif). Yogyakarta : CAPS

**Sumber Jurnal :**

Akib, Haedar. 2010. Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa dan Bagaimana. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik. Volume 1. No 1.

Kiwang, Amir S. 2014. Kebijakan Publik dan Efektifitas Organisasi. Jurnal Kebijakan Publik. Vol.5

Suandi, I Wayan. 2010. Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana bali. Vol.I No. 01, Tahun 2010.

**Sumber Tesis:**

Nurani, Dwi. (2017). Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Dalam Manajemen Sumer Daya Apratur Di Pemerintah Kota Padang Panjang. Tesis. Padang: Universitas Andalas.

Putra Ilham Madjid(2011). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.

Agusniar Rizka Luthfia (2009). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Di Badan Kepegawaian Daerah Surakarta. Tesis. Surakarta : Universitas Sebelas Maret

**Peraturan :**

Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2014. Tentang Aparatur Sipil Negara.

Keputusan Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Depdagri dan Pemda

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Nomor 10 Seri D)

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 80 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Kerja Oragnisasi,

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati di Bidang Administrasi Kepegawaian Kepada Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur